



TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

HARI BURUH - Aktis dari berbagai aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (1/5).

**Tiga Massa Buruh Aksi di Malioboro** • Wakil Wali Kota Minta Pekerja Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

**YOGYA, TRIBUN** - Sedikitnya ada tiga kelompok massa buruh menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di Yogyakarta, yang terpusat di sepanjang Jalan Malioboro hingga Nol Kilometer Yogyakarta. Ketiganya memanfaatkan jalan utama Malioboro hingga titik Nol Kilometer sebagai tempat menyampaikan aspirasi. Puluhan massa ketiga aksi ini berdatangan hampir bersamaan. Menu-

rut pantauan *Tribun Jogja*, masing-masing massa berdatangan hanya berselang 15-20 menit. Massa pertama yang datang, ada-

• ke halaman 7

## Tiga Massa

• Sambungan Hal 1

lah Komite Aksi Mayday 2019, yang merupakan gabungan beberapa serikat pekerja semisal Serikat Pekerja Nasional. Mereka melakukan pawai menggunakan satu kendaraan roda empat dan puluhan motor.

Massa kedua dari Aliansi Rakyat Untuk Satu Mei (Arus). Massa gabungan KPR, P3S, Serbuk, LMND, PRD, SBSI hingga Sekber ini melakukan *long march* di Jalan Malloboro dan melakukan orasi di depan Gedung Agung.

Massa ketiga merupakan massa yang menyuarakan keadilan bagi pekerja disabilitas. Massa ini didominasi gabungan gerakan mahasiswa Yogyakarta di antaranya berasal dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Komite Aksi May Day 2019 menyuarakan upah layak bagi kaum buruh yang ada di DIY. Isryad Ade Irawan, Juru Bicara Komite Aksi May Day 2019 mengungkapkan, aspirasi ini disuarakan lagi lantaran pemerintah saat ini dirasa belum benar-benar memperjuangkan nasib mereka.

Pihaknya menilal, saat ini buruh di Yogyakarta masih berada dibawah ketentuan hidup layak dan belum mendapatkan upah layak sesuai standar kehidupan di Yogyakarta. "Upah murah yang menjadi pilihan Pemda DIY, selain menyebabkan sukarnya buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, patut diduga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan serta lebarnya kesenjangan sosial di DIY," sebut Isryad kepada *Tribun Jogja* disela aksinya di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Isryad yang juga sebagai Ketua DPD Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY ini juga menyinggung perihal wilayah DIY, yang saat ini, justru dilabel sebagai provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi di Indonesia.

Hal ini dibuktikan angka Gini Ratio di Yogyakarta yang mencapai 0,441 atau naik 0,009 angka Rasio Gini dari Maret 2017 sebesar yang hanya sebesar 0,431. "Bisa dikatakan, Pemda DIY telah gagal dalam mewujudkan hak konstitusional dan hak hukum buruh di DIY, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kota yang katanya istimewa ini," sa-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005